



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
REVISI

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI
2025

KATA PENGANTAR



“Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Banyuwangi menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Banyuwangi.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BPPP Banyuwangi bantuan perangkat lunak berbasis Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. *Performance* BPPP Banyuwangi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BPPP Banyuwangi Tahun 2025 sebagai kontrak kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 yang mana IKU BPPP Banyuwangi merupakan hasil cascading dari IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan, IKU Level I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BPPSDMKP) dan IKU Level II Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada bidang pelatihan dan penyuluhan masyarakat KP serta dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. BPPP Banyuwangi melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Banyuwangi serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun 2025. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, Namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BPPP Banyuwangi.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi kepada yang berkepentingan.

Banyuwangi, 20 Januari 2025
Kepala BPPP Banyuwangi,



Moch. Muchlisin

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Keragaan SDM.....	4
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	4
1.6 Potensi dan Permasalahan.....	6
2. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.1.1 Visi.....	9
2.1.2 Misi.....	10
2.1.3 Tujuan.....	11
2.1.4 Sasaran Program.....	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan.....	13
2.3 Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi.....	14
2.4 Pengukuran Kinerja.....	20
2.4.1 Rumus Pengukuran.....	20
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS.....	22
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama.....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	22
3.3 Pengarus Utamaan Gender (PUG).....	89
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025.....	92
3.5 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi.....	92
BAB IV. PENUTUP.....	94
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	94
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Per 31 Desember Tahun 2025	4
Tabel 2. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.....	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Revisi Bulan Agustus 2025 (Bidang Pelatihan).....	15
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Revisi Desember (Penyuluhan)	16
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Bulan Januari (Bidang Penyuluhan)	17
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Revisi Agustus (Bidang Penyuluhan)	19
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Revisi Desember (Bidang Penyuluhan).....	20
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.....	23
Tabel 10. Capaian Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%).....	26
Tabel 11. Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi.....	27
Tabel 12. Capaian indikator Kinerja 2 Triwulan IV Tahun 2025.....	30
Tabel 13. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	32
Tabel 14. Capaian indikator Kinerja 3 Triwulan IV Tahun 2025.....	34
Tabel 15. Perbandingan realisasi Nilai PNPB Triwulan IV Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	35
Tabel 16. Capaian Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	37
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Tahun 2025	41
Tabel 18. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	42
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Tahun 2025	44
Tabel 20. Perbandingan realisasi Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (Indeks) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	45
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2025.....	47
Tabel 22. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	48
Tabel 23. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	51
Tabel 24. Perbandingan realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	52
Tabel 25. Capaian indikator Kinerja 9 Tahun 2025.....	55
Tabel 26. Perbandingan realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	56
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 10 Tahun 2025	58
Tabel 28. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	59
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)...	62
Tabel 30. Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP	

Banyuwangi (Nilai).....	63
Tabel 31. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai).....	65
Tabel 32. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai).....	66
Tabel 33. Indikator kinerja Utama 13 Triwulan IV Tahun 2025.....	68
Tabel 34. Perbandingan realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.....	69
Tabel 35. Capaian indikator Kinerja 14 Tahun 2025.....	71
Tabel 36. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.....	72
Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja 15 Tahun 2025.....	74
Tabel 38. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	75
Tabel 39. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit).....	78
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	79
Tabel 41. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (paket).....	81
Tabel 42. Perbandingan realisasi Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (Paket) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	82
Tabel 43. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang).....	84
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	85
Tabel 45. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (Orang).....	87
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.....	88
Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP Banyuwangi Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
Tabel 48. Realisasi Anggaran per kegiatan.....	92
Tabel 49. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2025	3
Gambar 2. Capaian Kinerja IKU + IKM.....	21
Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 BPPP Banyuwangi.....	22

RINGKASAN

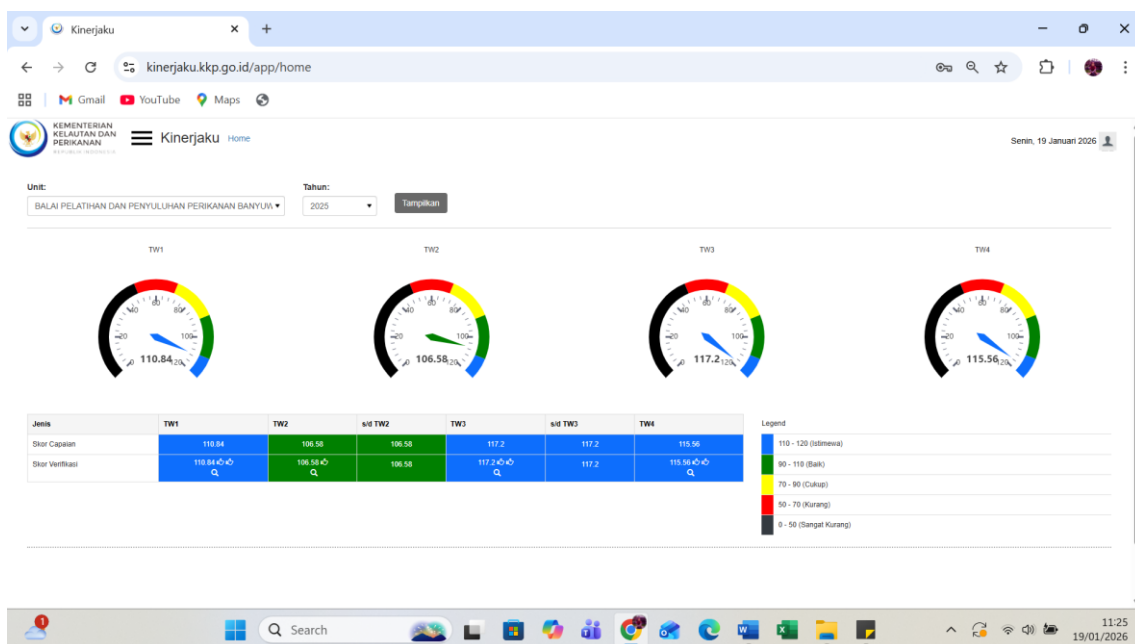
Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat perubahan pada sasaran dan indikator kinerja pelatihan dan penyuluhan sehingga saat ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 4 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama dengan 13 IK berstatus biru dan 6 IK berstatus hijau. Pada triwulan ini ada beberapa perubahan yaitu:

1. Pada sasaran **Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan berubah** menjadi **Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan** dengan perubahan pada indikator kinerja berikut:
 - a) Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village / SFV) BP3 Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan) menjadi Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village/SFV*) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK Kpdengan target 1 desa.
 - b) IKU Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang) menjadi Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA).
 - c) Menghapus IKU Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang).
 - d) Selain itu juga terjadi revisi target pada masing-masing IKU
2. Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dihapus** seluruhnya
3. Indikator **Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi** yang sebelumnya berada pada Sasaran Kinerja **Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan** dipindahkan ke Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Penyuluhan**

Kelautan dan Perikanan.

4. Penambahan Indikator Kinerja pada sasaran Kinerja **Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan** yaitu Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi pada triwulan ini **sebesar 115,56%**.



Gambar 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis TW IV

Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	75	83,16	110,88
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	1.030	1.030	1.770	120
3	Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,32	0,32	0,40	120
4	Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1	1	1	100
II. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
5	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	100	100	100
6	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	83	85,43	102,93
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
8	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	80	83,15	103,94
9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	92	99,69	108,36
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,50	71,50	100	120
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
13	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)	5.090	5.090	6.220	120
14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	216	216	260	120
15	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	772	772	950	120
16	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	44	55	120
17	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (Paket)	1	1	2	120
18	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi	9	9	11	120
IV. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
19	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	15	27	120



IKU dibawah Pusat Pelatihan KP



IKU dibawah Pusat Penyuluhan KP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN, Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi pada Triwulan IV Tahun 2025 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah sesuai yang tertuang pada RENSTRA BPPP Banyuwangi.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BPPP Banyuwangi serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPPP Banyuwangi guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi.

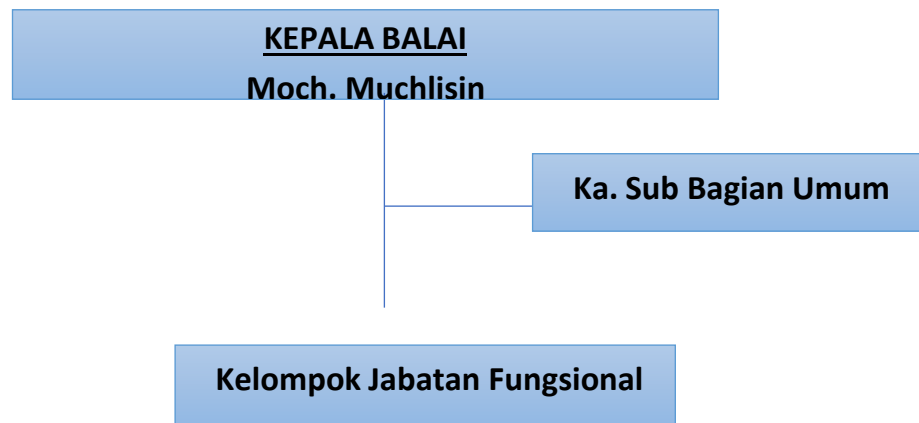
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan IV BPPP Banyuwangi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Tahun 2025.
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk meningkatkan kinerjanya sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER- 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dipimpin oleh kepala balai yang merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator dengan struktur organisasi terdiri atas Sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas BPPP Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, sertapelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
- d. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utamadan pelaku usaha
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sedangkan tugas dari setiap organisasi di BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Subbagian Umum melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4 Keragaan SDM

Dalam mendukung kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025, jumlah SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi pelatihan dan penyuluhan. Perkembangan jumlah SDM Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, berikut data jumlah pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Per 31 Desember Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1
2.	Kepala Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	16
4.	Widyaiswara	1
5.	Fungsional Tertentu	11
6.	Fungsional Umum	36
7.	Penyuluh Perikanan PNS	376
8.	Penyuluh Perikanan PPPK	295
9.	PPPK Administrasi	15
10.	PPPK Paruh Waktu	19
Total		771

Sumber: Kepegawaian BPPP Banyuwangi, 2025

Jumlah pegawai BPPP Banyuwangi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 309 orang perempuan (40%) dan 462 pegawai berjenis kelamin laki-laki (60%). Komposisi pegawai BPPP Banyuwangi menunjukkan bahwa proporsi pegawai laki-laki (60%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (40%). Kesenjangan ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang kelautan dan perikanan, khususnya di lembaga pelatihan teknis, masih relatif rendah dibandingkan laki-laki

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Dasar haluan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja BPPP

Banyuwangi pada Tahun 2025 adalah :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. PP No 08 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53 tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPP Banyuwangi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2025 serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di Tahun 2025. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

**LKJ BPPP
Banyuwangi
mengacu pada
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014**

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025
- **Bab I Pendahuluan**, menyajikan hal-hal umum tentang BPPP Banyuwangi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis BPPP Banyuwangi 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
- **Bab IV Penutup**, menyajikan uraian singkat terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi.
- **Lampiran**, menyajikan pendukung laporan seperti Perjanjian Kinerja, Surat tugas penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran per IKU

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan pada wilayah kerja di untuk pelatihan berada pada 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sedangkan untuk wilayah kerja penyuluhan ada pada 4 propinsi yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kegiatan pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di bidang budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kegiatan penyuluhan bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan serta penyusunan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swsdaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian karena adanya potensi sumberdaya BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Memiliki SDM yang berpengalaman di bidangnya
2. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang memadai dan representatif
3. Penyelenggarakan Diklat bidang kepelautan
4. Memiliki lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP) I KP yang telah dilisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP Kelautan dan Perikanan
5. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)

6. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia KP untuk mengembangkan mutu diklat

b. Permasalahan

Pada tahun ini, pemerintah mengambil kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi pengurangan/penghematan anggaran yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini target yang hendak dicapai satker BPPP Banyuwangi beberapa kali dilakukan penyesuaian target dengan jumlah anggaran yang tersedia. Selain masalah anggaran, sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain:

❖ Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas;
2. Sarana dan prasarana pelatihan belum memenuhi standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan perkembangan teknologi saat ini;
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
4. Kompetensi SDM pelatihan BPPP Banyuwangi perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP, wilayah 3T dan kepulauan
6. Ketertelusuran (*tracer study*) lulusan pendidikan dan pelatihan belum efektif.
7. Modul pembelajaran belum adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan industri.
8. Standar pelatihan dan sertifikasi belum sepenuhnya sinkron dengan K/L lain dan standar internasional.

❖ Aspek ketenagaan penyuluh perikanan

Ketenagaan penyuluh perikanan dimana Penyuluh Perikanan sangat

berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

- a) Tata kelola penyuluhan daerah belum optimal sehingga pendampingan pelaku usaha tidak merata
- b) Jumlah penyuluh perikanan masih belum sebanding dengan jumlah pelaku utama yang harus disuluh.
- c) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- d) Penyebaran penyuluh perikanan belum merata di seluruh kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan.
- e) Penyuluh perikanan masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan, dan sumber daya pendukung lainnya.
- f) Sebagian SDM penyuluh belum memiliki kepakaran kelautan.
- g) Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis masih terbatas.
- h) Legislasi dan regulasi terkait penyuluhan perikanan belum seluruhnya tersedia dan mendukung pelaksanaan tugas.
- i) Kualitas dan kuantitas penyuluh perikanan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan penempatan, masih belum memadai.
- j) Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas penyuluh secara optimal.
- k) Materi penyuluhan belum spesifik lokasi
- l) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan masih terbatas seperti anggaran penumbuhan kelompok pelaku usaha belum tersedia khusus.

2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

2.1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi BPPP Banyuwangi pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP

dan visi BPPSDMKP dan Puslatluh yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2 Misi

Misi BPPP Banyuwangi adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM, Puslatluh dalam bidang kelautan dan perikanan. Misi Presiden Prabowo yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Berdasarkan 8 misi presiden tersebut, BPPP Banyuwangi mendukung misi ke 3, 4, dan 6. Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat,

memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan Puslatluh. Untuk itu tujuan BPPP Banyuwangi adalah menghasilkan SDMKP mandiri dan kompeten yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menjadi wirausaha dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara optimal serta sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP, dengan indikator tujuan adalah:

1. Tersedianya lembaga pelatihan dan penyuluhan KP sesuai dengan standar
2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sesuai standard
3. Tersedianya tenaga pelatihan dan kepelatihan yang profesional
4. Peserta latih yang kompeten
5. Jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya
6. Penyuluh perikanan yang kompeten dan berdaya saing.

2.1.4 Sasaran Program

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) Sasaran Strategis yakni:

1. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Banyuwangi memiliki empat Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 19 Indikator Kinerja Utama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai di Triwulan IV tahun 2025.

Sasaran strategis pertama (SK.01) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) dengan target sebesar 75%
2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang) dengan target sebanyak 1.030 peserta
3. Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar) target 0,319 miliar dengan pembulatan keatas menjadi 0,32 miliar
4. Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa) dengan target 1 desa

Sasaran Strategi ketiga (SK.02) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut :

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%) dengan target 100%
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks) dengan target indeks sebesar 83
3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%) dengan target sebesar 85%
4. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target nilai sebesar 80
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%) dengan target sebesar 80%
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan target sebesar 80%
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan

target nilai sebesar 92

8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target nilai sebesar 71,5

Sasaran strategis keempat (SK.03) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan target sebesar 5.090 kelompok
2. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan target sebanyak 216 kelompok
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan target sebanyak 772 kelompok
4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit) dengan target sebanyak 44 unit
5. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (paket) dengan target 1 paket
6. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) dengan target 9 orang

Sasaran Strategis keenam (SK.04) Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (orang) dengan target sebanyak 15 orang.

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 menetapkan program yaitu kegiatan pelatihan dan Penyuluhan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.785.524.000 dengan rincian kegiatan, yaitu:

Tabel 2. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautandan perikanan	5.237.251.000

2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi	98.356.223.000
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		103.593.474.000

Sumber: DIPA Revisi ke-9 BPPP Banyuwangi Tahun 2025

2.3 Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi dengan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (PuslatKP) dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (PusluhKP).

Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi dilakukan dengan (PuslatKP) dan (PusluhKP). Sejak bulan Januari sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, telah terjadi dua kali perubahan yaitu pada bulan Agustus dan Desember 2025 dengan PuslatKP dan PusluhKP. Adapun rincian Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi secara berurutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025 (Bidang Pelatihan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (orang)	3.763
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.353
		3	Nilai PNPB BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5	Sarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1
		6	Prasarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	85

			perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi	71,5

Pada Bulan Agustus 2025 terjadi perubahan karena terjadi penetapan IKU baru yaitu Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan. Rincian perubahan PK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Revisi Bulan Agustus 2025 (Bidang Pelatihan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (orang)	3.763
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.353
		3	Nilai PNBPP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120
		5	Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)	1
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1
		7	Prasarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100

Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
	10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85
	11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80
	12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80
	13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi	71,5

Pada bulan Desember 2025, telah dilakukan kembali revisi Perjanjian Kinerja antara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dengan Pusat Pealtihan Kelautan dan Perikanan. Beberapa perubahan yang dilakukan yaitu penghapusan IKU Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang), Sarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit), dan Prasarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit). Penghapusan indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar 100% sehingga IKU ini tidak dapat dilaksanakan. Selain itu juga ada penyesuaian target pada beberapa IKU. Rincian perubahan PK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Revisi Desember (Pelatihan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	1.030

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3	Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,319
		4	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		6	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85
		8	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80
		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80
		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi	71,5

Perjanjian Kinerja Bidang Penyuluhan antara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bulan Januari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Bulan Januari (Bidang Penyuluhan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	5.996
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	216

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	791
		4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	44
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15

Pada bulan Agustus terjadi perubahan penetapan perjanjian Kinerja bidang penyuluhan dengan PusluhKP yaitu penambahan sasaran kegiatan Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja berupa Media Penyuluhan sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (paket). Rincian perubahan PK bidang penyuluhan bulan Agustus 2025 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Revisi Agustus (Bidang Penyuluhan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	5.996
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	216
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	791
		4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	44
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15

Pada bulan Desember, terjadi revisi Perjanjian Kinerja lingkup Pusat Penyuluhan. Terdapat perubahan beberapa perubahan yaitu mengurangi sasaran kegiatan target Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok) dari sebelumnya 5.996 orang menjadi 5.090, Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok) dari sebelumnya 791 menjadi 772, dan terdapat penambahan Indikator Kinerja Jumlah penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi di BPPP Banyuwangi sebanyak 9 orang sehingga total target capaian IKU sebanyak 7 Indikator. Rincian perubahan PK bidang penyuluhan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Revisi Desember (Bidang Penyuluhan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	5.090
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	216
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	772
		4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	44
		5	Media Penyuluhan sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (paket)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi	9
		7	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15

2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum atau istimewa adalah 120;
- b. Angka minimum atau belum ada penilaian adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah

berbeda;

d. Status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Capaian Kinerja IKU + IKM

2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

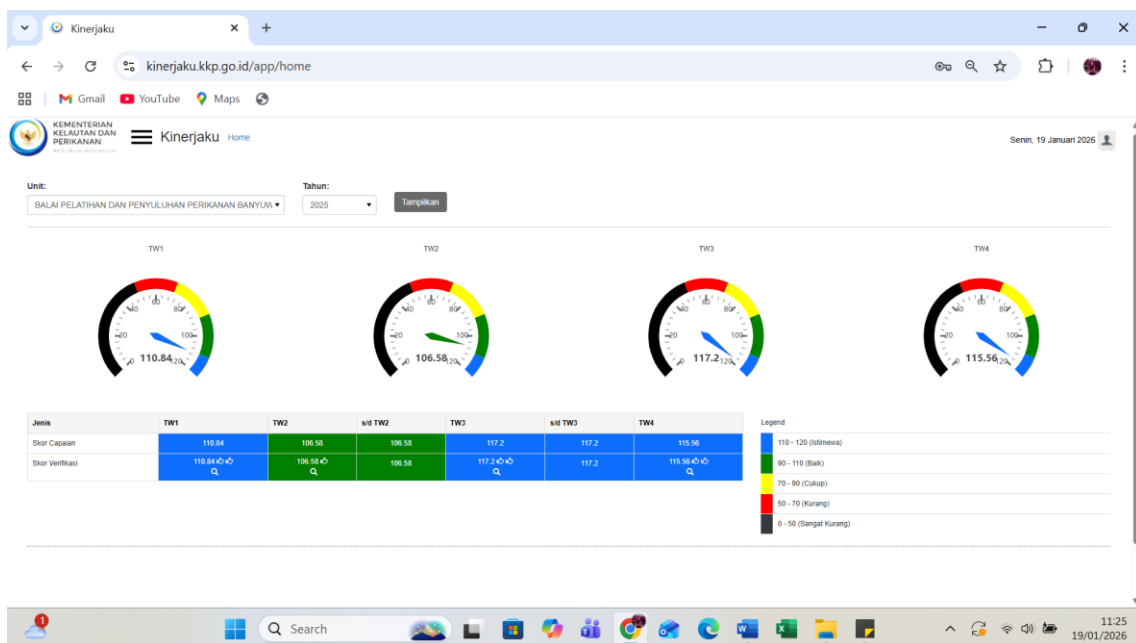
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Banyuwangi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja lingkup BPPP Banyuwangi yang ditetapkan melalui SK Kepala BPPP Banyuwangi Tahun 2025 Nomor: B.228/BPPP.BYW/TU.140/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kinerja dan SAKIP TA. 2025. Pada pelaksanaannya, capaian kinerja Triwulanan dipantau oleh Tim Teknis Kelola Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada kepala Balai. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Kerja Program dan Monev merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 di tingkat korporat sebesar 115,56% sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 BPPP Banyuwangi

Sumber: web kinerjaku.kkp.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2025. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Banyuwangi yang menjadi kontrak kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	75	75	83,11	110,81
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	1.030	1.030	1.770	120
3	Nilai PNPB Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,32	0,32	0,40	120
4	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP	1	1	1	100
II. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
5	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	100	100	100
6	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	83	85,43	102,93
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
8	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	80	83,15	103,94

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	92	99,69	108,36
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,50	71,50	100	120
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
13	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)	5.090	5.090	6.220	120
14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	216	216	260	120
15	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	772	772	950	120
16	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	44	55	120
17	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (Paket)	1	1	2	120
18	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi	9	9	11	120
IV. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
19	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	15	27	120

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 4 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 1) Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA), 2) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi 3) Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi, 4) Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP. Sasaran program ini didukung anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp. 394,319,000,00 dan realisasi sebesar Rp. 174,437,030,00 dengan persentase 99,94 %. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Jumlah lulusan pelatihan terserap DUDIKA merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha pada semester 2 tahun sebelumnya dan semester 1 tahun berjalan yang telah bekerja di DUDIKA dan atau menerapkan hasil pelatihan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada tahun 2025 target pada indikator ini sebesar 75 % dan telah tercapai sebesar 83,11%. Berikut capaian indikator yang dimaksud.

Tabel 10. Capaian Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

IKU 1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)									
Realisasi TW 4				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
60	65	70	76,91	75	83,11	110,81	8,06	75	110,81

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi persentase lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) mencapai 83,11%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja IKU 1 mencapai 110,81%, yang menunjukkan kinerja sangat baik.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 76,91%, terjadi peningkatan sebesar 8,06% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas penyelenggaraan pelatihan serta meningkatnya relevansi kompetensi lulusan terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sektor kelautan dan perikanan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar kerja, penguatan kurikulum dan metode pembelajaran, peningkatan kualitas instruktur, serta perluasan jejaring kemitraan dengan DUDIKA.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPP Banyuwangi Tahun 2025–2029, diketahui bahwa sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang memenuhi bahkan melampaui target. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Banyuwangi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada IKU Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP

Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA), realisasi Tahun 2025 mencapai 83,11% lebih tinggi dibandingkan target Renstra Tahun 2025 sebesar 75%, dengan tingkat capaian sebesar 110,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja BPPP Banyuwangi dalam menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan terserap di dunia kerja telah berjalan sangat baik serta melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Pencapaian tersebut mengindikasikan adanya keselarasan antara program pelatihan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, capaian yang melampaui target Renstra juga mencerminkan keberhasilan penguatan kualitas pelatihan, peningkatan kompetensi lulusan, serta optimalisasi kemitraan dengan DUDIKA. Secara umum, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 berada pada jalur yang positif untuk mendukung pencapaian target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025–2029 secara berkelanjutan..

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Tabel 11. Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	75	83,11	110,81
2	BPPP Tegal	75	95,79	120,00
3	BPPP Bitung	75	75,16	100,21
4	BPPP Ambon	75	75	100,00
5	BPPP Medan	75	76,75	102,33

Berdasarkan data capaian persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri pada Tahun 2025, seluruh BPPP telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan di masing-masing satuan kerja telah mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebesar 83,11% dengan tingkat capaian 110,81%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan berada di atas target nasional. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelatihan serta dukungan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menyerap lulusan pelatihan. Dibandingkan dengan satuan kerja lainnya, capaian BPPP

Banyuwangi berada di bawah BPPP Tegal yang mencapai 120,00%, namun lebih tinggi dibandingkan BPPP Bitung, BPPP Ambon, dan BPPP Medan yang capaian kinerjanya berada pada kisaran 100,00%–102,33%. Perbedaan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh variasi karakteristik wilayah, intensitas kerja sama dengan DUDIKA, serta kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan di masing-masing daerah. Secara keseluruhan, capaian BPPP Banyuwangi menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kinerja nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam penyediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten dan siap kerja.

E. Analisis Keberhasilan/ Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) pada Tahun 2025 yang mencapai 110,81% dari target didukung oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor kunci adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sektor kelautan dan perikanan sehingga kompetensi lulusan memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kualitas pelaksanaan pelatihan turut berkontribusi terhadap keberhasilan capaian kinerja, antara lain melalui ketersediaan instruktur yang kompeten dan berpengalaman, metode pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik, serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang meningkatkan daya saing lulusan. Pelaksanaan praktik kerja dan pemagangan juga memperkuat kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Faktor pendukung lainnya adalah penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDIKA) yang membuka peluang penyerapan lulusan secara lebih luas. Selain itu, dukungan manajemen dan koordinasi internal yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pelatihan turut memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, sinergi

antara perencanaan yang tepat, kualitas pelaksanaan pelatihan, serta dukungan kemitraan dengan DUDIKA menjadi faktor utama keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai dan melampaui target kinerja Tahun 2025.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi peran penyuluh perikanan di lapangan dalam pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan, sehingga dapat mengurangi kebutuhan biaya perjalanan bagi petugas evaluasi. Selain itu, proses rekapitulasi hasil evaluasi pasca pelatihan menjadi lebih efisien karena data hasil evaluasi telah disampaikan dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan. Efisiensi juga didukung melalui optimalisasi anggaran pelatihan yang dilakukan melalui perencanaan kegiatan yang terarah, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan secara maksimal. Penugasan instruktur dan tenaga pendukung dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kegiatan, sehingga proses pelatihan dapat berjalan optimal tanpa pemborosan sumber daya. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang melampaui target dengan sumber daya yang tersedia menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Upaya strategis BPPP Banyuwangi dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase lulusan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri diantaranya:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
2. Melaksanakan Evaluasi Pasca Diklat (EPD) untuk mengukur efektivitas pelatihan dan penerapan keterampilan oleh lulusan
3. Mengoptimalkan peran penyuluh perikanan dalam membantu evaluasi pasca pelatihan di lapangan
4. Menganalisis hasil evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan perbaikan

- penyelenggaraan pelatihan berikutnya
- Melaksanakan pendampingan oleh penyuluh perikanan melalui identifikasi kebutuhan, pengisian instrumen evaluasi, dan penerapan hasil pelatihan.

Indikator Kinerja Utama 2

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria: Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan reguler (*full* tatap muka) dan pelatihan *online* atau daring, dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi dengan formula perhitungan akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. IKU ini didukung anggaran dengan pagu Rp. 310.510.000,00 dan realisasi Rp 310.352.981 dengan persentase capaian 99,95%. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih diperoleh dari data Katimja Pelatihan dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Capaian indikator Kinerja 2 Triwulan IV Tahun 2025

IKU 2-Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)									
Realisasi TW 4				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025– 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 4	Realisasi Tw 4	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
4.348	3.109	3.453	7.475	1.030	1.770	120	-76,31%	1.030	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan di BPPP Banyuwangi mencapai 1.770 orang, melampaui target Triwulan IV sebesar 1.030 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 120%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan mampu menjangkau peserta melebihi target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Secara kumulatif, realisasi Tahun 2025 juga telah melampaui target tahunan yang

ditetapkan dalam Renstra BPPP Banyuwangi, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 menunjukkan dinamika jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih mencapai 7.475 orang, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi hingga Triwulan IV tercatat sebanyak 1.770 orang. Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 76,31%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan fokus dan skala pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyesuaian kebijakan program, serta penetapan target Renstra Tahun 2025–2029 yang lebih terukur dan realistis akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Meskipun secara jumlah terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi pelatihan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan pada Tahun 2025 lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas kegiatan, sejalan dengan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPP Banyuwangi Tahun 2025–2029, capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2025, realisasi jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan di BPPP Banyuwangi mencapai 1.770 orang, melampaui target Renstra Tahun 2025 sebesar 1.030 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra Tahun 2025 mencapai 120% yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pelatihan serta optimalisasi

sumber daya yang tersedia. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan mampu menjangkau peserta melebihi target yang telah ditetapkan meskipun terdapat penyesuaian skala dan fokus kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel 13. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	1030	1770	120,00
2	BPPP Tegal	12540	15629	120,00
3	BPPP Bitung	400	475	118,75
4	BPPP Ambon	400	715	120,00
5	BPPP Medan	430	456	106,05

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebanyak 1.770 orang dari target 1.030 orang, dengan tingkat capaian sebesar 120,00%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sejajar dengan capaian beberapa UPT lainnya, seperti BPPP Tegal dan BPPP Ambon yang juga mencapai tingkat capaian 120,00%. Dibandingkan dengan UPT lainnya, capaian BPPP Banyuwangi berada pada kelompok UPT dengan kinerja tertinggi, meskipun secara absolut jumlah peserta yang dilatih masih lebih rendah dibandingkan BPPP Tegal yang memiliki target dan realisasi lebih besar. Perbedaan jumlah target dan realisasi antar UPT dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas sarana prasarana, serta skala pelaksanaan pelatihan di masing-masing satuan kerja. Secara keseluruhan, capaian BPPP Banyuwangi menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kinerja BPPSDMKP, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan pelatihan yang efektif dan tepat sasaran.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan karena telah tersedianya

pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar. Faktor pendukung lainnya adalah sinergi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Dukungan penyuluh perikanan di lapangan berperan penting dalam menjaring peserta serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelatihan. Secara keseluruhan, kombinasi antara perencanaan yang matang, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi dan kemitraan yang efektif menjadi faktor utama keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam melampaui target kinerja pada Tahun 2025.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari perencanaan kegiatan pelatihan yang terarah, pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan secara optimal, serta pengaturan jadwal dan metode pelatihan yang efektif. Dukungan penyuluh perikanan di lapangan turut berperan dalam menjaring peserta dan mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga pelatihan dapat menjangkau peserta lebih luas dengan biaya yang relatif terkendali. Selain itu, pemanfaatan koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait memungkinkan pelaksanaan pelatihan berjalan lebih efektif, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun sumber daya manusia. Penugasan instruktur dan tenaga pendukung dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kegiatan, sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan optimal.

G. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Pelatihan tersebut mencakup beberapa bidang utama, antara lain kepelautan, kelautan, budidaya perikanan, serta diversifikasi produk olahan hasil perikanan. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan perkembangan teknologi serta kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pelaku usaha maupun aparatur. Selain pelatihan tatap muka, sebagian kegiatan juga dilaksanakan secara daring sebagai upaya memperluas jangkauan peserta, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, serta memberikan akses pembelajaran yang lebih merata bagi peserta dari berbagai wilayah. Dengan kombinasi metode luring dan daring, kegiatan penunjang ini mampu menjangkau lebih banyak peserta dan mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Indikator Kinerja Utama 3

Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)

IKU ini merupakan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. IKU ini dukungan anggaran dengan pagu Rp. 783.175.000,00 dan realisasi 0 karena adanya blokir anggaran, sedangkan target pencapaian kinerja PNBP sebesar 0,319 miliar rupiah berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat BPPSDMKP Nomor 3143/BPPSDM.1/KU.340/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Capaian Kinerja PNBP Triwulan IV Tahun 2025 Capaian IKU nilai PNBP BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian indikator Kinerja 3 Triwulan IV Tahun 2025

IKU 3. Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Miliar Rupiah)									
Realisasi TW 4				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 4	Realisasi Tw 4	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	0,47	1,35	0,32	0,40	120	-70,37	0,32	120

A. Capaian tahun 2025

Pada indikator Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi, realisasi Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp0,40 miliar dari target Rp0,32 miliar, atau sebesar 120%. Hal ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan layanan dan fasilitas pelatihan yang dikelola oleh BPPP Banyuwangi, serta meningkatnya minat pemangku kepentingan terhadap layanan pelatihan yang diselenggarakan.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai PNBPN BPPP Banyuwangi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, nilai PNBPN tercatat sebesar Rp0,47 miliar, meningkat signifikan menjadi Rp1,35 miliar pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 (hingga Triwulan IV), realisasi PNBPN baru mencapai Rp0,4 miliar, dengan persentase penurunan sebesar 70,37% dibanding tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran dan adanya blokir anggaran 100% pada kegiatan pelatihan kepelautan yang bisa menarik PNBPN.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi Berdasarkan Renstra BPPP Banyuwangi 2025–2029, target PNBPN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp0,32 miliar. Dengan capaian hingga Triwulan IV sebesar Rp0,4 miliar, tingkat capaian terhadap target tahunan mencapai 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa hingga Triwulan IV, kinerja PNBPN sudah melampaui target Renstra.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Perbandingan realisasi Nilai PNBPN Triwulan IV Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	0,32	0,4	120,00
2	BPPP Tegal	14,26	25,85	120,00
3	BPPP Bitung	0,19	0,23	120,00
4	BPPP Ambon	0,74	0,78	105,41

5	BPPP Medan	0,05	0,06	120,00
---	------------	------	------	--------

Berdasarkan tabel di atas, BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik pada Tahun 2025. Dengan target PNBPN sebesar Rp0,32 miliar, BPPP Banyuwangi mampu merealisasikan Rp0,40 miliar atau mencapai 120,00% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menempatkan BPPP Banyuwangi sejajar dengan beberapa UPT lain yang juga berhasil melampaui target PNBPN.

Secara nominal, realisasi PNBPN BPPP Banyuwangi masih berada di bawah BPPP Tegal yang mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp25,85 miliar dari target Rp14,26 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh skala layanan, jenis kegiatan, serta intensitas pemanfaatan fasilitas yang berbeda antar satker. Namun demikian, dari sisi persentase capaian terhadap target, kinerja BPPP Banyuwangi setara dengan BPPP Tegal, BPPP Bitung, dan BPPP Medan yang sama-sama mencapai 120%.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Sebagian besar PNBPN diperoleh melalui pemanfaatan layanan yang diberikan serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu juga adanya komitmen pimpinan dengan penandatanganan kontrak kinerja PNBPN serta upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelatihan.

F. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Analisis Program/ Faktor Pendukung

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU PNBPN BPPP Banyuwangi Tahun 2025 tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, tanpa memerlukan investasi tambahan yang signifikan. Kegiatan yang berkontribusi terhadap PNBPN dilaksanakan dengan memaksimalkan aset eksisting sehingga penggunaan anggaran dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu, pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara efisien melalui penugasan instruktur dan tenaga teknis sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan layanan. Pengelolaan kegiatan berbasis perencanaan yang terarah memungkinkan peningkatan realisasi PNBPN dengan dukungan sumber daya yang relatif tetap.

Pelaksanaan kegiatan pendukung PNBPN juga didukung oleh tertib

administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, sehingga seluruh potensi penerimaan dapat direalisasikan secara optimal. Dengan capaian PNBPN yang melampaui target menggunakan sumber daya yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya pada IKU PNBPN BPPP Banyuwangi Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

G. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan untuk pencapaian kinerja ini antara lain melalui pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana lainnya yang sudah tidak terpakai sehingga pengelolaan aset menjadi lebih tertib dan efisien. Selain itu, dilakukan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, khususnya pemanfaatan kolam bundar untuk kegiatan budidaya lele. Pemanfaatan kolam bundar tersebut tidak hanya mendukung kegiatan pelatihan dan praktik budidaya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN melalui hasil produksi yang bernilai ekonomi.

Indikator Kinerja Utama 4

Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)

Konsep *Smart Fisheries Village* (SFV) merupakan inisiatif strategis KKP yang bertujuan membangun sektor perikanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep SFV ini dilaksanakan di Desa Ngablak dengan mengadopsi tiga pilar utama: (1) *Circular Economy* untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan; (2) Pengembangan ekonomi berbasis digital melalui pelatihan talenta dan UKM; dan (3) Mekanisme kerja sama melalui kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership*). Kegiatan yang telah diimplementasikan yaitu Pembangunan 20 unit Kolam Bundar berbahan terpal dengan diameter 3 meter.

Tabel 16. Capaian Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)

<i>IKU 4- Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)</i>

Realisasi				Tahun 2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
2	1	0	1	1	1	100	-	1	100

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, IKU 4 *Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP* ditargetkan sebanyak 1 desa. Realisasi yang dicapai juga sebanyak 1 desa, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi SFV telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan mendukung sasaran strategis pengembangan desa perikanan berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, jumlah Desa Perikanan Cerdas yang difasilitasi pada Tahun 2025 sama dengan capaian Tahun 2024, yaitu sebanyak 1 desa. Dengan demikian, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian (stagnan), yang tercermin dari nilai persentase kenaikan 2024–2025 sebesar 0 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi SFV tetap terjaga secara konsisten.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan target Renstra BPPP Banyuwangi, capaian fasilitasi Desa Perikanan Cerdas telah memenuhi target Renstra, dengan realisasi 1 desa dari target 1 desa atau 100 persen capaian terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa program SFV di BPPP Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan strategis dan berkontribusi terhadap penguatan pembangunan perikanan berbasis teknologi di tingkat desa.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan. Selain itu, perbandingan juga tidak dapat dilakukan dengan UPT BPPP Lingkup BPPSDM KP karena IKU ini hanya diampu oleh BPPP Banyuwangi.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKU Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village/SFV*) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP didukung oleh perencanaan program yang terarah dan berbasis kebutuhan wilayah. Penetapan lokasi desa sasaran dilakukan melalui identifikasi potensi kelautan dan perikanan, kesiapan kelembagaan, serta komitmen pemerintah desa dan pelaku utama dalam mengadopsi inovasi teknologi.

Faktor pendukung lainnya adalah sinergi dan koordinasi yang baik antara BPPP Banyuwangi dengan pemerintah daerah, penyuluh perikanan, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat desa. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh penyuluh perikanan berperan penting dalam memastikan penerapan IPTEK KP dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, baik instruktur maupun penyuluh, serta dukungan sarana dan prasarana pelatihan dan pendampingan turut memperkuat keberhasilan pelaksanaan program SFV. Selain itu, adanya kerjasama yang baik antar UPT lingkup Pusat Pelatihan KP untuk menerapkan dan mengintegrasikan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pengabdian Masyarakat. Komitmen seluruh jajaran BPPP Banyuwangi dalam mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam tercapainya target kinerja IKU ini sesuai dengan yang telah ditetapkan.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan IKU Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village/SFV*) tercermin dari peran BPPP Banyuwangi yang fokus pada fasilitasi pembangunan kolam bundar sebagai sarana penerapan IPTEK KP di tingkat desa. Pendekatan fasilitasi ini

memungkinkan pencapaian target kinerja tanpa memerlukan penggunaan anggaran dan sumber daya yang besar.

Pembangunan dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan lokasi dan dukungan dari pemerintah desa serta pelaku utama perikanan, sehingga sarana yang dibangun dapat langsung dimanfaatkan. Pemanfaatan tenaga pendamping lokal dan koordinasi dengan penyuluh perikanan setempat turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pengawasan dan pendampingan pasca pembangunan. Dengan cakupan kegiatan yang terfokus dan pemanfaatan sumber daya yang ada, capaian kinerja IKU SFV Tahun 2025 dapat direalisasikan secara optimal.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja IKU SFV antara lain adalah fasilitasi pembangunan kolam bundar sebagai sarana budidaya perikanan berbasis teknologi. Selain itu, dilakukan koordinasi dan pendampingan dengan pemerintah desa serta penyuluh perikanan setempat untuk memastikan sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat perikanan.

Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pada Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 8 (delapan) IKU dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.356.223.000,00 dan realisasi Rp. 97.223.056.104,00 dengan persentase sebesar 98,89%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 5

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan laporan yang mendukung

kegiatan manajemen internal BPPP Banyuwangi. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu Rp. 98.356.223.000,00 dan realisasi Rp 97.223.056.104,00 dengan persentase sebesar 98,89% dan capaian indikator layanan dukungan manajemen internal Triwulan IV tahun 2025 capaian dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Tahun 2025

IKU 5-Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)									
Realisasi TW 4				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 4	Realisasi Tw 4	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	78,38	77,27	100	100	100	29,42	100	100

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi mencapai 100% dari target 100%, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja yang positif dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu % pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 29,42% ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pelaksanaan fungsi dukungan manajemen internal, termasuk aspek administrasi, tata kelola keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan periode 2021–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2021 dan 2022, indikator ini belum muncul sebagai IKU. Seiring dengan peningkatan sistem tata kelola dan manajemen internal, capaian meningkat menjadi 78,38% (2023) dan sedikit menurun menjadi 77,27% (2024) sebelum akhirnya melonjak kembali menjadi 100% (2025). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan sistem dukungan manajemen memberikan hasil nyata pada tahun berjalan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi.

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 sebesar 100%, capaian tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan bahwa kinerja layanan dukungan

manajemen internal sudah cukup baik dengan tingkat capaian terhadap target Renstra sebesar 100%.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	100	100	100,00
2	BPPP Tegal	100	100	100,00
3	BPPP Bitung	100	100	100,00
4	BPPP Ambon	100	100	100,00
5	BPPP Medan	100	100	100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh satuan kerja, termasuk BPPP Banyuwangi, BPPP Tegal, BPPP Bitung, BPPP Ambon, dan BPPP Medan, mencapai realisasi 100 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum layanan dukungan manajemen internal pada UPT lingkup BPPSDM KP telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian BPPP Banyuwangi yang setara dengan UPT lainnya mencerminkan konsistensi dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen internal. Meskipun capaian antar-UPT menunjukkan nilai yang sama, perbedaan karakteristik, skala organisasi, dan kompleksitas tugas masing-masing satuan kerja tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja secara komprehensif.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU 5 didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam memperkuat tata kelola organisasi serta peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen. Koordinasi yang baik antarunit kerja serta kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku menjadi faktor utama dalam tercapainya kinerja secara optimal. Selain itu, penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel turut mendukung kelancaran pelaksanaan layanan

dukungan manajemen internal di BPPP Banyuwangi. Capaian keberhasilan karena telah tersusunnya seluruh dokumen laporan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi sebanyak 54 dokumen yaitu:

- Laporan SPIP sebanyak 4 dokumen
- Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 4 dokumen
- Kertas kerja perencanaan (RKAKL dan DIPA) sebanyak 1 dokumen
- Laporan kinerja sebanyak 4 dokumen
- Perjanjian Kinerja sebanyak 1 dokumen
- Manual IKU sebanyak 1 dokumen
- Rencana aksi sebanyak 1 dokumen
- Laporan Tahunan 1 dokumen
- Laporan Program/Kegiatan 1 dokumen
- Matrik manajemen risiko sebanyak 1 dokumen
- Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen
- Laporan BMN sebanyak 2 dokumen
- Laporan keterbukaan informasi publik (KIP) sebanyak 2 dokumen
- Rekapitulasi Arsip 1 dokumen
- *Printscreen* aplikasi Smart DJA, kinerjaku, Emonev Bappenas, dan OMSPAN sebanyak 16 dokumen

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya Efisiensi sumberdaya

Pada aspek sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui peningkatan produktivitas pegawai dan penerapan pola kerja yang adaptif. Beberapa pegawai dilibatkan lintas bidang untuk mendukung kegiatan prioritas, sehingga beban kerja dapat tersebar merata tanpa penambahan tenaga baru. Selain itu juga adanya upaya optimalisasi sumber daya manusia dan sarana pendukung yang tersedia tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Pelaksanaan layanan dukungan manajemen dilakukan melalui penguatan koordinasi internal serta pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.

G. Analisis Program / Faktor Pendukung Kinerja

IKU ini dapat tercapai dengan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu, pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib, serta peningkatan koordinasi dan pembinaan internal. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen dan aplikasi pendukung turut memperlancar proses administrasi dan pengambilan keputusan sehingga layanan dukungan manajemen dapat berjalan secara optimal.

Indikator Kinerja Utama 6

Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan dashboard IP ASN pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>. Pada triwulan IV Nilai IPASN BPPP Banyuwangi telah mencapai nilai 85,43 berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Tahun 2025

IKU 6- Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (Indeks)									
Realisasi TW 4				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 4	Realisasi Tw 4	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
74,60	83,39	82,97	85,04	83	85,43	102,93	2,88	83	102,93

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, IKU Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi ditetapkan dengan target sebesar 83. Realisasi capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 85,43, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 102,93 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori

baik.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 85,04, nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2025 meningkat menjadi 85,43. Peningkatan ini tercermin dari persentase kenaikan kinerja Tahun 2024–2025 sebesar 2,88 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penguatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BPPP Banyuwangi.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi 2025

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025, capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN telah melampaui target Renstra, dengan realisasi 85,43 dari target 83 atau 102,93 persen capaian terhadap target. Hal ini mencerminkan kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan ASN dengan arah kebijakan dan perencanaan strategis organisasi.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 201. Perbandingan realisasi Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (Indeks) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	83	85,43	102,93
2	BPPP Tegal	83	85,04	102,46
3	BPPP Bitung	83	83,82	100,99
4	BPPP Ambon	83	84,19	101,43
5	BPPP Medan	83	85,17	102,61

Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berada pada kinerja yang sangat baik dibandingkan UPT lain di lingkup BPPSDM KP. Dengan target indeks sebesar 83, BPPP Banyuwangi

berhasil mencapai realisasi 85,43 atau setara dengan capaian 102,93%, yang merupakan capaian tertinggi dibandingkan UPT pembanding lainnya. Capaian ini melampaui BPPP Medan (102,61%), BPPP Tegal (102,46%), BPPP Ambon (101,43%), dan BPPP Bitung (100,99%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan profesionalitas ASN di BPPP Banyuwangi berjalan lebih optimal, baik dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, maupun disiplin ASN. Posisi ini menegaskan peran BPPP Banyuwangi sebagai salah satu UPT dengan tata kelola SDM yang efektif dan konsisten dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah terdapat pegawai lingkup BPPP Banyuwangi yang mendapatkan peningkatan pendidikan sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat, komitmen seluruh pegawai di lingkup BPPP Banyuwangi, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Selain itu, media komunikasi *Whatsapp* menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai. Ditambah dengan adanya pelatihan/peningkatan kompetensi secara online sehingga mudah diakses dan tidak membuuthkan biaya.

F. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Analisis Program/ Faktor Pendukung

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU ini tercermin dari optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia yang ada tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Program peningkatan profesionalitas ASN dilaksanakan secara terintegrasi dengan tugas dan fungsi pegawai, sehingga hasil yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Banyuwangi ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;

2. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
3. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
4. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.
5. Masing-masing pegawai mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti sehingga nilai kompetensi pegawai dapat tercapai

Indikator Kinerja Utama 7

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)

Berdasarkan jumlah rekomendasi hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP pada lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) oleh Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 tidak ada temuan atau pun rekomendasi pada BPPP Banyuwangi sehingga persentasenya dianggap senilai 85%. Capaian IKU ini pada Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2025

<i>IKU-7 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)</i>									
Realisasi TW IV				2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	100	100	100	85	85	100	-	85	100

A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2025, menunjukkan kinerja yang optimal. Dari target TW IV sebesar 85%, BPPP Banyuwangi berhasil merealisasikan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebesar 85% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian IKU-7 pada Tahun 2025 menunjukkan konsistensi kinerja, di mana pada Tahun 2024 realisasi telah mencapai 100% dan tetap dipertahankan pada Tahun 2025 sebesar 100%. Tidak terdapat kenaikan persentase capaian karena indikator telah berada pada kondisi optimal sejak tahun sebelumnya, namun keberlanjutan capaian ini menunjukkan stabilitas sistem pengawasan dan tindak lanjut yang telah berjalan efektif.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi 2025–2029 untuk indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85%, dan realisasi hingga Triwulan IV telah mencapai 100% pula. Dengan demikian, capaian terhadap target mencapai 100%, yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi telah berjalan secara fungsional, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	85	85	100,00
2	BPPP Tegal	85	100	117,65
3	BPPP Bitung	85	85	100,00
4	BPPP Ambon	85	85	100,00
5	BPPP Medan	85	85	100,00

Berdasarkan perbandingan realisasi IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan UPT lingkup

BPPSDM KP, BPPP Banyuwangi mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini diperoleh karena tidak terdapat temuan hasil pengawasan pada Tahun 2025, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan target pemanfaatan rekomendasi dapat dipenuhi secara optimal.

Kondisi serupa juga terjadi pada BPPP Bitung, BPPP Ambon, dan BPPP Medan yang masing-masing mencapai 100%, karena tidak adanya temuan hasil pengawasan pada tahun berjalan. Sementara itu, BPPP Tegal mencatat capaian sebesar 117,65%, yang disebabkan oleh adanya temuan hasil pengawasan dan seluruh rekomendasi yang dihasilkan telah ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga realisasi pemanfaatan rekomendasi melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian BPPP Banyuwangi sejalan dengan mayoritas UPT lingkup BPPSDM KP dan mencerminkan efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap tata kelola organisasi, dengan variasi capaian yang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya temuan hasil pengawasan pada masing-masing satuan kerja.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam memanfaatkan 100% rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja menunjukkan bahwa terdapat sistem yang baik dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan. Faktor pendukung utama keberhasilan ini meliputi:

- 1) Respons cepat terhadap temuan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal (misalnya dari Itjen).
- 2) Adanya komitmen pimpinan dan tim kerja untuk menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi rutin dan dasar perbaikan sistem.
- 3) Dokumentasi dan pelaporan yang tertib, yang memudahkan pemantauan dan pengukuran efektivitas tindak lanjut.
- 4) Koordinasi lintas unit kerja yang berjalan efektif dalam mengimplementasikan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diterima.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Pemanfaatan hasil pengawasan secara penuh berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan adanya perbaikan yang

dilakukan berdasarkan rekomendasi yang menyorot proses kerja yang berisiko pemborosan atau inefisiensi, serta implementasi rekomendasi memperkuat sistem pengendalian internal, yang secara langsung menekan potensi kesalahan, duplikasi kerja, dan inefisiensi anggaran.

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Pemanfaatan rekomendasi pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dimaknai sebagai alat perbaikan manajemen program. Faktor keberhasilan pelaksanaan program yang berbasis rekomendasi pengawasan dilakukan melalui:

1. Menerapkan sistem monitoring evaluasi berkala yang memastikan bahwa setiap rekomendasi yang masuk dikaji, dijadwalkan tindak lanjutnya, dan dilaporkan progresnya.
2. Membuka diri terhadap kritik dan audit sehingga rekomendasi tidak dianggap sebagai temuan semata, tetapi bagian dari proses peningkatan kinerja.
3. Menerapkan budaya kerja yang adaptif terhadap pembaruan prosedur, sehingga perbaikan sistem atau SOP dari hasil pengawasan bisa langsung diintegrasikan ke dalam aktivitas unit kerja.

Indikator Kinerja Utama 8

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU ini merupakan IKU Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PANdan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. IKU ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 98.356.223.000,00 dan realisasi Rp. 97.223.056.104,00 dengan persentase sebesar 98,89%.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya

dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Sampai pada akhir tahun 2024, BPPP Banyuwangi telah melakukan penilaian SAKIP sesuai dengan Surat dari Sekretaris Kepala BPPSDMKP No. B.4486/BPPSDM.1/RC.510/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Hasil Penilaian mandiri SAKIP Level 3 Lingkup BPPSDM dengan perolehan nilai sebesar 83,15.

Tabel 23. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU-8. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)									
Realisasi				Tahun 2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025- 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	81,5	83,65	80	83,15	103,94	-0,60	80	103,94

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi mencapai 83,15, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80. Dengan capaian tersebut, persentase pencapaian kinerja mencapai 103,94%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi di BPPP Banyuwangi telah berjalan dengan baik.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 83,65, nilai Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025 mengalami penurunan tipis sebesar 0,60%. Meskipun terjadi penurunan secara numerik, capaian Tahun 2025 tetap berada di atas target Renstra dan masih menunjukkan konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja organisasi.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi 2025

Target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk IKU Penilaian Mandiri SAKIP ditetapkan sebesar 80. Realisasi yang dicapai sebesar 83,15 menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target dengan persentase capaian 103,94%. Hal ini mencerminkan kesesuaian antara

perencanaan strategis dengan implementasi kinerja serta efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja internal.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	80	83,15	103,94
2	BPPP Tegal	80	83,5	104,38
3	BPPP Bitung	80	83,15	103,94
4	BPPP Ambon	80	83,5	104,38
5	BPPP Medan	80	85	106,25

Jika dibandingkan dengan UPT lingkup BPPSDMKP lainnya, capaian Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi berada pada kategori baik dan kompetitif. Seluruh UPT berhasil melampaui target nilai 80, dengan capaian berkisar antara 103,94% hingga 106,25%. BPPP Banyuwangi memiliki nilai yang setara dengan BPPP Bitung, meskipun masih berada sedikit di bawah BPPP Medan yang mencatat capaian tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi telah sejajar dengan UPT lain dalam penerapan SAKIP dan memiliki ruang untuk terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola kinerja.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menerapkan manajemen kinerja secara konsisten. Faktor pendukung lainnya meliputi penyelarasan perencanaan kinerja dengan Renstra dan perjanjian kinerja, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, adanya koordinasi internal yang baik turut mendukung keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Selain itu juga didukung adanya aplikasi *dsms* yang telah memuat menu *template* penilaian mandiri

SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP dan adanya ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan selama 5 tahun terakhir.

F. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Efisiensi ini tercermin dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani pelaksanaan SAKIP, sehingga proses perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Selain itu, pemanfaatan aplikasi yang telah memuat menu dan template penilaian mandiri SAKIP turut mendukung efisiensi waktu dan konsistensi pemenuhan dokumen, karena seluruh komponen penilaian telah tersusun secara sistematis sesuai ketentuan. Penggunaan aplikasi ini juga meminimalkan potensi kesalahan administrasi serta mempercepat proses evaluasi internal.

Efisiensi pelaksanaan SAKIP juga didukung oleh konsistensi penugasan operator yaitu petugas yang menangani penilaian mandiri SAKIP merupakan operator yang sama dengan pengelola aplikasi Kinerjaku. Kondisi ini memudahkan pemahaman keterkaitan antar dokumen kinerja, mempercepat proses pemenuhan bukti dukung, serta meningkatkan kualitas integrasi antara perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, optimalisasi SDM, pemanfaatan aplikasi pendukung, serta konsistensi penugasan operator menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi..

G. Analisis Program/Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2025, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM KP melalui kegiatan *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh BPPSDM KP
2. Menyusun Dokumen penilaian mandiri SAKIP dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
3. Melakukan penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada *Google Drive* milik BPPP Banyuwangi
4. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator dan pelaporan kinerja

Indikator Kinerja Utama 9

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)

IKU ini merupakan IKU baru dan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 didasarkan pada tujuh unsur dengan bobot nilai, yaitu: ketersediaan dokumen RKBMN 2026 (5%), pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL 2025 (7,5%), usulan penetapan status penggunaan BMN hingga Triwulan IV (25%), usulan pemindahtanganan/penghapusan BMN rusak berat (25%), penggunaan BMN hasil belanja modal 2024 disertai BAST/BAP (20%), penyusunan laporan BMN semesteran dan tahunan tepat waktu (12,5%), serta usulan RKBMN 2027 (5%). Total bobot keseluruhan mencapai 100%. Capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025”. Capaian Kinerja PNBPP BPPP Banyuwangi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Capaian indikator Kinerja 9 Tahun 2025

IKU-8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)									
Realisasi				Tahun 2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025– 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	0	0	80	100	120	-	80	120

A. Capaian tahun 2025

Pada Tahun 2025, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi mencapai nilai 100, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80. Dengan capaian tersebut, persentase pencapaian kinerja mencapai 120%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di BPPP Banyuwangi telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.%

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN merupakan IKU baru yang mulai diukur pada Tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena belum

tersedia data historis sebagai pembandingan. Meski demikian, capaian Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN ditetapkan sebesar 80. Realisasi yang dicapai sebesar 100 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan BMN telah melampaui target dengan persentase capaian 120%. Hal ini mencerminkan efektivitas penerapan tata kelola BMN serta komitmen satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas aset negara.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Perbandingan realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	80	100	120,00
2	BPPP Tegal	80	97,5	120,00
3	BPPP Bitung	80	95	118,75
4	BPPP Ambon	80	80	100,00
5	BPPP Medan	80	97,5	120,00

Dibandingkan dengan UPT lingkup BPPSDMKP lainnya, capaian BPPP Banyuwangi berada pada kategori sangat baik. Seluruh UPT umumnya mampu mencapai atau melampaui target, dengan persentase capaian berkisar antara 100% hingga 120%. BPPP Banyuwangi termasuk dalam UPT dengan capaian tertinggi, sejajar dengan BPPP Tegal dan BPPP Medan, serta berada di atas BPPP Bitung dan BPPP Ambon. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di BPPP Banyuwangi telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai

standar yang ditetapkan.

E. Analisis Keberhasilan/ Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pengelola BMN terhadap regulasi pengelolaan barang milik negara, mulai dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga pelaporan BMN. Selain itu, koordinasi yang baik antara pengelola BMN dengan unit kerja terkait serta pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi BMN secara berkala turut menjadi faktor penting dalam mendukung capaian kinerja..

F. Analisis Program/ Faktor Pendukung

Pelaksanaan pengelolaan BMN di BPPP Banyuwangi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Pengelolaan administrasi BMN dilaksanakan melalui pemanfaatan aplikasi pengelolaan BMN yang telah tersedia, sehingga memudahkan proses pencatatan, monitoring, dan pelaporan aset tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Efisiensi juga tercermin dari optimalisasi peran pengelola BMN yang telah memahami tugas dan tanggung jawab sehingga pengelolaan aset dapat berjalan efektif dengan dukungan sumber daya yang terbatas.

G. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN antara lain pelaksanaan inventarisasi BMN secara berkala, penertiban administrasi dan dokumen kepemilikan aset, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMN, serta koordinasi dan pembinaan internal kepada unit kerja terkait. Kegiatan tersebut memastikan bahwa seluruh aset negara yang dikelola BPPP Banyuwangi tercatat, dilaporkan, dan dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja Utama 10

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan

melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Capaian indikator ini didasarkan pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2025. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 10 Tahun 2025

IKU-10 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi TW IV			2025				Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	80	100	120	-	80	120

A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan IV Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 100% dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dari target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian 120% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang direncanakan telah diumumkan secara terbuka dan tepat waktu melalui sistem yang ditentukan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi tahun 2025 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 80%, dan pada Triwulan IV capaian telah mencapai 100% atau 120% terhadap target. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan publikasi pengadaan telah dilakukan secara proaktif dan melebihi ekspektasi. Capaian ini mencerminkan kedisiplinan unit kerja dalam menyiapkan dokumen pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta kesigapan dalam mengintegrasikan seluruh perencanaan ke dalam sistem SIRUP sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	80	100	120,00
2	BPPP Tegal	80	100	120,00
3	BPPP Bitung	80	100	120,00
4	BPPP Ambon	80	100	120,00
5	BPPP Medan	80	100	120,00

Pada Triwulan IV Tahun 2025, seluruh UPT lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Banyuwangi, menunjukkan capaian maksimal dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebesar 100% dari target 80% atau mencapai 120% capaian, sama seperti

yang dicapai oleh BPPP Tegal, Bitung, Ambon, dan Medan. Keseragaman capaian ini menandakan bahwa seluruh UPT telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan pemerintah. Bagi BPPP Banyuwangi, capaian ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan dan kesiapan pengadaan sudah dilakukan dengan baik sejak awal tahun, sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 100% pengumuman RUP pada SIRUP dari target 80% (capaian 120%) menunjukkan penerapan manajemen pengadaan yang sangat baik. Faktor-faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya perencanaan awal tahun yang matang dan terintegrasi sehingga seluruh paket pengadaan telah teridentifikasi lebih awal.
2. Koordinasi erat antara perencana anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan tim pengadaan, yang memastikan semua kegiatan terinput dalam sistem tepat waktu.
3. Pemanfaatan sistem SIRUP secara optimal, serta pemahaman SDM terhadap prosedur dan regulasi pengadaan berbasis elektronik.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala, yang mendorong disiplin waktu dalam pelaksanaan dan pelaporan.
5. Pemahaman regulasi LKPP dan sistem SIRUP yang memadai oleh tim pelaksana pengadaan.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi ini tampak dari tidak adanya keterlambatan dalam penginputan RUP, yang secara langsung mengurangi risiko terjadinya tender ulang, keterlambatan realisasi kegiatan, serta potensi pemborosan anggaran. Selain itu, proses dokumentasi pengadaan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi memungkinkan penghematan waktu dan tenaga kerja administratif.

G. Analisis Program/Faktor Keberhasilan

Keberhasilan program pengadaan tahun 2025, khususnya dalam aspek publikasi RUP, ditopang oleh beberapa program yaitu:

1. Mengikuti pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya terkait sistem pengadaan berbasis elektronik
2. Pimpinan unit kerja ikut melakukan pengawasan yang menjadikan keterbukaan dalam pengadaan sebagai bagian dari budaya organisasi.

Indikator Kinerja Utama 11

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. IKU ini berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. IKU ini didukung oleh anggaran dengan sebesar Rp. 42.245.000,00 dan realisasi Rp. 42.062.086,00 dengan persentase sebesar 99,57%. Pencapaian indikator ini berdasarkan penginputan perencanaan pada aplikasi OMSPAN. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan pada akhir tahun 2025. Guna mencapai keberhasilan indikator ini BPPP Banyuwangi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pada masing-masing indikator yang merupakan IKU tahunan. Capaian IKU ini berdasarkan nota dinas dari Kepala Biro Keuangan Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU-11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)									
Realisasi				Tahun 2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
98,48	96,72	95,63	96,76	92	99,69	108,36	3,03	92	108,36

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi mencapai 99,69, melampaui target yang ditetapkan sebesar 92. Dengan capaian tersebut, persentase pencapaian kinerja mencapai 108,36%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran di BPPP Banyuwangi telah berjalan sangat baik, tertib, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 96,76, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,93 poin menjadi 99,69 atau naik sebesar 3,03%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan anggaran, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Capaian tersebut mencerminkan komitmen BPPP Banyuwangi dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan yaitu perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ditetapkan sebesar 92. Realisasi yang

dicapai sebesar 99,69 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran telah melampaui target dengan persentase capaian 108,36%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengendalian internal dan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran sepanjang Tahun 2025.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

No	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	92	99,69	108,36
2	BPPP Bitung	92	97,6	106,09
3	BPPP Ambon	92	97,81	106,32
4	BPPP Medan	92	100	108,70

Jika dibandingkan dengan UPT lingkup BPPSDMKP lainnya, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi berada pada kategori sangat baik dan kompetitif. Seluruh UPT yang dibandingkan mampu melampaui target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 92, dengan persentase capaian berkisar antara 106,09% hingga 108,70%. Capaian BPPP Banyuwangi berada sedikit di bawah BPPP Medan, namun lebih tinggi dibandingkan BPPP Bitung dan BPPP Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran BPPP Banyuwangi telah sejajar dengan UPT terbaik di lingkup BPPSDMKP.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja Banyuwangi terhadap komponen dan indikator dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran dan tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi OMSPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Banyuwangi. Dengan adanya kegiatan strategis

yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OMSPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Pengelolaan anggaran di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 dilaksanakan secara efisien dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan secara optimal membantu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Efisiensi juga tercermin dari minimnya revisi anggaran yang tidak diperlukan serta optimalisasi penyerapan anggaran sesuai rencana kegiatan, sehingga capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tinggi dapat diraih tanpa tambahan sumber daya yang signifikan.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan penunjang yang berkontribusi terhadap pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara rutin, peningkatan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dan unit pelaksana kegiatan, serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan negara secara konsisten. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menjaga disiplin pelaksanaan anggaran turut memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu juga melakukan pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi halaman III DIPA.

Indikator Kinerja Utama 12

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran, yang mencakup aspek konsistensi perencanaan, ketepatan pengalokasian anggaran, keselarasan

dengan dokumen perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. IKU ini didukung anggaran dengan pagu sebesar Rp. 42.245.000,00 dan realisasi Rp. 42.062.086,00 dengan persentase sebesar 99,57%. Pencapaian indikator ini berdasarkan nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan memperoleh nilai sebesar 100.

Tabel 31. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU-25. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)									
Realisasi				Tahun 2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	85,65	100	71,5	100	120	-	71,5	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi mencapai nilai 100, melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,5. Dengan capaian tersebut, persentase pencapaian kinerja mencapai 120%, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi telah dilaksanakan secara sangat baik, sesuai dengan kaidah perencanaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang telah mencapai nilai 100, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Tahun 2025 tetap terjaga pada nilai maksimal. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan kualitas perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi, serta keberhasilan dalam mempertahankan standar perencanaan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran ditetapkan sebesar 71,5. Realisasi yang dicapai sebesar 100 menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran telah melampaui target Renstra dengan persentase capaian 120%. Kondisi ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan dengan kebutuhan organisasi serta arah kebijakan yang telah ditetapkan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	71,5	100	120,00
2	BPPP Tegal	71,5	100	120,00
3	BPPP Bitung	71,5	100	120,00
4	BPPP Ambon	71,5	100	120,00
5	BPPP Medan	71,5	100	120,00

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi antara lain adanya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menyusun perencanaan anggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan strategis, serta pemahaman yang baik dari satuan kerja terhadap komponen dan indikator penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menjaga kualitas perencanaan sejak tahap penyusunan hingga pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh disiplin dalam pelaksanaan penganggaran serta tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengisian aplikasi SMART DJA sebagai instrumen penilaian kinerja perencanaan anggaran. Dengan adanya SOP dan pelaksanaan

kegiatan strategis yang terencana, progres capaian IKU tahunan dapat dipantau secara sistematis dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengisian aplikasi SMART DJA oleh SDM yang memiliki kompetensi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan capaian IKU. Sinergi antara pemahaman regulasi, kompetensi SDM, serta penerapan SOP yang konsisten menjadi faktor kunci keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai dan mempertahankan nilai kinerja perencanaan anggaran yang optimal.

F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui pemanfaatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sehingga proses perencanaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan mempertahankan capaian nilai maksimal dengan sumber daya yang relatif tetap.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain penyusunan dan rewiu dokumen perencanaan anggaran secara berkala, penyelarasan program dan kegiatan antar unit kerja, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran. Kegiatan tersebut memastikan bahwa perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi disusun secara sistematis, terukur, dan konsisten dengan sasaran strategis organisasi.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran program ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan penyuluhan dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 6 IKU dan dukungan anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp. 88.371.533.000 dan realisasi sebesar Rp. 87.331.828.567,00 dengan persentase

sebesar 98,82%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 13

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Dengan format perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu Rp. 4.842.932.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.842.930.564,00 dengan persentase sebesar 100%. Pencapaian IKU Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh pada Tahun 2025 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Indikator kinerja Utama 13 Triwulan IV Tahun 2025

IKU 13- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (Kelompok)									
Realisasi TW IV				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
2.308	2.744	2.577	4.700	5.090	6.220	120	32,34	5.090	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, jumlah Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi mencapai 6.220 kelompok, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5.090 kelompok. Dengan capaian tersebut, persentase pencapaian kinerja mencapai 120% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok perikanan telah berjalan sangat optimal dan melampaui sasaran yang direncanakan.

B. Perbandingan Capaian dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 4.700 kelompok, capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 6.220 kelompok atau meningkat 32,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan peran penyuluh perikanan dalam menjangkau lebih banyak kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung, serta meningkatnya intensitas dan cakupan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPPP Banyuwangi.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk IKU ini ditetapkan sebesar 5.090 kelompok. Realisasi yang dicapai sebesar 6.220 kelompok menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target Renstra dengan persentase capaian 120%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34. Perbandingan realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	5.090	6.220	120,00
2	BPPP Tegal	50	50	100,00
3	BPPP Bitung	2.530	3.000	118,58
4	BPPP Ambon	2.500	2.600	104,00
5	BPPP Medan	3.880	4.598	118,51

Berdasarkan tabel di atas, Jika dibandingkan dengan UPT lingkup BPPSDMKP lainnya, capaian BPPP Banyuwangi berada pada kategori sangat baik dengan persentase capaian tertinggi sebesar 120%, sejajar dengan

beberapa UPT lain yang juga menunjukkan capaian tinggi. Dibandingkan dengan BPPP Tegal, BPPP Bitung, BPPP Ambon, dan BPPP Medan, BPPP Banyuwangi mampu menjangkau jumlah kelompok yang lebih besar, mencerminkan optimalisasi peran penyuluhan dan dukungan kelembagaan di wilayah kerja BPPP Banyuwangi.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh ketersediaan dan peran aktif penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kelompok secara berkelanjutan. Adanya sinergi yang baik antara BPPP Banyuwangi dengan pemerintah daerah, kelembagaan kelompok perikanan, serta pelaku usaha turut memperkuat pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pendekatan penyuluhan yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah kelompok yang berhasil disuluh. Selain itu, juga adanya kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan melakukan evaluasi kinerja penyuluh melalui laporan kegiatan penyuluhan yang disertakan dengan data dukung dan SKP beserta dokumennya

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja dan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang ter-*cascading* langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah telah dilakukannya pendampingan terhadap kelompok binaannya seperti pendampingan dalam bantuan modal, bantuan pemerintah, pendampingan

dalam kemitraan / pasar, pendampingan penginputan atau pendaftaran KUSUKA, pendampingan penilaian kelas kelompok dan peningkatan kelas kelompok.

Indikator Kinerja Utama 14

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, dengan formula perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012. IKU ini didukung dengan anggaran dengan pagu Rp. 4.842.932.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.842.930.564,00 dengan persentase sebesar 100%. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi Tahun 2025 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data dukung oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Capaian indikator Kinerja 14 Tahun 2025

IKU 14 - Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)									
Realisasi				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
312	313	312	310	216	260	120	-16,13	216	260

A. Capaian Triwulan IV Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi jumlah Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Banyuwangi mencapai 260 kelompok dari target 216 kelompok dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan pembinaan dan

peningkatan kapasitas kelompok telah melampaui target yang ditetapkan.

B. Perbandingan Capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 310 kelompok, capaian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 16,13%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian fokus pembinaan yang lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dan kesiapan kelompok untuk naik kelas, bukan semata-mata pada kuantitas kelompok yang dibina.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk IKU ini ditetapkan sebesar 216 kelompok, sementara realisasi mencapai 260 kelompok. Dengan demikian, capaian kinerja terhadap target Renstra adalah 120%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kelas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	216	260	120,00
2	BPPP Bitung	80	110	120,00
3	BPPP Ambon	24	30	120,00
4	BPPP Medan	174	210	120,00

Berdasarkan perbandingan antar satker, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 120%, sejajar dengan BPPP Bitung, Ambon, dan Medan yang juga mencapai 120%. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional, pelaksanaan peningkatan kelas kelompok berjalan optimal, dengan BPPP Banyuwangi

tetap berada pada kelompok satker berkinerja sangat baik.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh adanya regulasi dan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok. Salah satu faktor utama adalah Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan PPTK, dan Penyuluh Perikanan Bantu, yang memberikan kejelasan peran, tugas, dan mekanisme kerja penyuluh dalam mendampingi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, tersedianya Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sangat membantu penyuluh perikanan dalam melaksanakan pendampingan secara terarah dan sistematis, khususnya dalam proses peningkatan kelas kelompok. Kombinasi antara regulasi yang jelas dan pedoman teknis yang memadai tersebut berkontribusi signifikan terhadap optimalnya pelaksanaan kegiatan dan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerjadan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.
3. Program dilakukan berbasis data dan kebutuhan, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menghabiskan sumber daya secara sia-sia. Dalam banyak kasus, penyuluhan peningkatan kelas dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan teknis lainnya, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi penyuluh

G. Analisis Program/Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan dilakukannya penilaian kelas kelompok sehingga diperoleh skor penilaian yang akan menentukan naik tidaknya kelas kelompok. Peningkatan kelas kelompok naik dimulai dari pemula ke madya dan madya ke utama.

Indikator Kinerja Utama 15

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan formula perhitungan Jumlah kelompok Pelaku usaha yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok. Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) sumber data diperoleh dari Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja 15 Tahun 2025

IKU 15- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)									
Realisasi				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
499	434	617	591	772	950	120	60,74	772	950

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, jumlah kelompok pelaku usaha/pendukung KP yang dibentuk oleh BPPP Banyuwangi mencapai 950 kelompok dari target 772 kelompok, atau setara dengan 120% capaian kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa pembentukan kelompok baru telah melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar 591 kelompok, capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 950 kelompok. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 359 kelompok atau sekitar 60,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan semakin intensifnya kegiatan penumbuhan kelompok melalui pendampingan penyuluh perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra Tahun 2025 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 772 kelompok, sementara realisasi mencapai 950 kelompok. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target Renstra dengan tingkat pencapaian sebesar 120%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembentukan kelompok di BPPP Banyuwangi.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	772	950	120,00
2	BPPP Bitung	289	339	117,30
3	BPPP Ambon	111	137	120,00
4	BPPP Medan	641	650	101,40

Dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 120%, sejajar dengan BPPP Ambon, serta lebih tinggi dibandingkan BPPP Bitung (117,30%) dan BPPP Medan (101,40%). Hal ini menegaskan bahwa BPPP Banyuwangi termasuk UPT dengan kinerja pembentukan kelompok yang optimal.

E. Analisis Keberhasilan/ Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pembentukan 950 kelompok atau 120% capaian terhadap target tahunan menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung utama antara lain:

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan PPTK, dan Penyuluh Perikanan Bantu
2. Tersedianya Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama turut mendukung penguatan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan
3. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.
4. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
5. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
6. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.
7. Kesadaran Pelaku utama/ Pelaku usaha KP tentang pentingnya membentuk kelompok terkait kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan, pemodal usaha dan kegiatan pelatihan

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Capaian yang tinggi dapat dicapai dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun tenaga pendamping. Beberapa bentuk

efisiensi yang tampak adalah:

1. Integrasi kegiatan pembentukan kelompok dengan program lainnya, seperti pelatihan atau pendampingan budidaya, sehingga pelaksanaannya hemat biaya dan waktu.
2. Pemanfaatan tenaga penyuluh lokal dan jejaring kelompok eksisting yang membantu memfasilitasi terbentuknya kelompok baru tanpa biaya tambahan.
3. Digitalisasi pelaporan dan koordinasi memungkinkan pemantauan pembentukan kelompok dilakukan lebih cepat dan efisien.
4. Adanya efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan penumbuhan kelompok yaitu aparat desa (lurah) , pelaku utama/usaha perikanan, dan penyuluh

G. Analisis Program /faktor keberhasilan

Dari sisi program, keberhasilan ini juga ditopang oleh desain kegiatan yang selaras dengan arah Renstra BPPP Banyuwangi dan kebijakan KKP, yang menargetkan penguatan kelembagaan masyarakat KP. Faktor keberhasilan lainnya mencakup:

1. Penyesuaian metode pembentukan kelompok dengan karakteristik lokal sehingga program lebih diterima oleh masyarakat sasaran.
2. Ketersediaan format baku dan SOP pembentukan kelompok, yang memudahkan proses administrasi dan legalisasi kelompok baru.
3. Ketersediaan insentif tidak langsung, seperti peluang menerima bantuan atau mengikuti pelatihan, yang mendorong masyarakat membentuk kelompok secara sukarela.
4. Pendampingan pasca-pembentukan, yang menunjukkan bahwa kelompok tidak hanya dibentuk untuk memenuhi target, tetapi juga diarahkan agar berkelanjutan dan produktif.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok.

Indikator Kinerja Utama 16

Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan kelompok dan atau koperasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP No 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Formula perhitungan untuk IKU ini yaitu Jumlah Gabungan Kelompok/Koperasi yang mendapatkan pendampingan penyuluh kelautan dan perikanan.

Tabel 39. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)

<i>IKU 16. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)</i>							Renstra KKP 2025 – 2029	
Realisasi			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	44	55	120	-	44	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, jumlah gabungan kelompo/koperasi yang mendapatkan pendampingan di BPPP Banyuwangi terealisasi sebanyak 55 unit dari target 44 unit, sehingga mencapai 120% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan pendampingan kelembagaan ekonomi pelaku usaha perikanan telah berjalan sangat optimal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan IKU baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya (2022–2024).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 44 unit, sedangkan

realisasi mencapai 55 unit. Dengan capaian sebesar 120%, kinerja pendampingan gabungan kelompok/koperasi di BPPP Banyuwangi telah melampaui target Renstra dan menunjukkan efektivitas pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi mampu menjalankan program pendampingan secara efektif, meskipun mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya penyuluh.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai sehingga perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	44	55	120
2	BPPP Bitung	27	28	103,70
3	BPPP Ambon	19	20	105,26
4	BPPP Medan	47	57	120,00

Dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, BPPP Banyuwangi mencapai capaian tertinggi bersama BPPP Medan dengan tingkat capaian 120%, lebih tinggi dibandingkan BPPP Bitung (103,70%) dan BPPP Ambon (105,26%). Hal ini menempatkan BPPP Banyuwangi sebagai salah satu UPT dengan kinerja pendampingan kelembagaan ekonomi pelaku usaha perikanan yang sangat baik.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 120% target pendampingan kelembagaan ekonomi masyarakat KP pada Triwulan IV 2025 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya pemanfaatan basis data kelembagaan eksisting, seperti koperasi nelayan, korporasi perikanan budidaya, dan gabungan kelompok usaha (Gapokkan), yang telah teridentifikasi dan siap didampingi. Kedua, ketersediaan penyuluh dan fasilitator yang memahami pendekatan kelembagaan dan bisnis, menjadi motor penggerak dalam mendorong lembaga tersebut menuju arah penguatan kapasitas manajemen dan usaha. Ketiga, dukungan lintas sektor, baik dari Dinas KP daerah, koperasi, maupun mitra usaha, mempercepat intervensi dalam bentuk pelatihan, fasilitasi

legalitas, atau akses pemasaran. Keempat, adanya komitmen internal manajemen satker dalam menjadikan penguatan kelembagaan ekonomi sebagai program prioritas di awal tahun.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Keberhasilan pembentukan 55 kelompok atau 120% capaian terhadap target tahun 2025 menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Pencapaian kinerja yang melampaui target menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya, terutama SDM penyuluh perikanan, telah dilakukan secara efisien. Pendampingan terhadap gabungan kelompok, koperasi, dan korporasi dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan penyuluhan rutin, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Faktor pendukung lainnya antara lain:

1. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.
2. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
3. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
4. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.

G. Analisis Program /faktor keberhasilan

Secara umum, keberhasilan capaian program di Triwulan IV Tahun 2025 pada BPPP Banyuwangi tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang terarah serta pelaksanaan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Beberapa faktor penunjang keberhasilan meliputi:

- (1) pemanfaatan aset yang optimal untuk mendukung layanan;
- (2) Koordinasi yang baik dengan UPT lain, pemerintah daerah, dan stakeholder

- terkait sehingga mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
- (3) Melakukan komitmen manajemen untuk mencapai target kinerja melalui monitoring dan evaluasi yang rutin.

Indikator Kinerja Utama 17

Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (paket)

Indikator ini mengukur jumlah media penyuluhan yang disusun dan disebarluaskan oleh Satker BPPP Banyuwangi dalam bentuk paket yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Media ini bisa berupa leaflet/brosur, buku saku penyuluhan, infografis cetak maupun digital, video tutorial penyuluhan, modul interaktif atau presentasi digital, media audio (*podcast*, radio penyuluhan). IKU ini baru terbentuk pada triwulan II dan merupakan IKU baru.

Tabel 41. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (paket)

Realisasi			2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	1	2	120	-	1	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPPP Banyuwangi menargetkan penyusunan dan penyebarluasan 1 paket media penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Realisasi capaian menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menyusun dan mendiseminasikan 2 paket media penyuluhan, sehingga capaian kinerja mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dibandingkan Tahun Sebelumnya

IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diimplementasikan pada Triwulan II Tahun 2025 sehingga belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, persentase

kenaikan capaian Tahun 2024–2025 tidak dapat dihitung. Meskipun demikian, capaian pada tahun pertama pelaksanaan telah melampaui target yang ditetapkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra Tahun 2025 untuk IKU ini adalah 1 paket media penyuluhan, sedangkan realisasi mencapai 2 paket (120%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BPPP Banyuwangi telah melampaui target Renstra, mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menyediakan media penyuluhan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha KP.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai sehingga perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 42. Perbandingan realisasi Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (Paket) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	1	2	120
2	BPPP Bitung	1	1	100,00
3	BPPP Ambon	1	1	100,00
4	BPPP Medan	1	1	100,00

Dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, BPPP Banyuwangi mencatat capaian tertinggi, yaitu 120%, sementara BPPP Bitung, Ambon, dan Medan masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi lebih proaktif dalam pengembangan dan pemanfaatan media penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku usaha.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU 17 didukung oleh peran aktif BPPP Banyuwangi sebagai penyusun dan pembuat media penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penyusunan media didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan di lapangan, sehingga materi yang disampaikan relevan dan aplikatif. Selain itu, dukungan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perikanan dan penyuluhan, ketersediaan sarana pendukung

produksi media, serta pemanfaatan platform digital turut mempercepat proses penyusunan dan penyebarluasan media penyuluhan. Sinergi antar unit kerja dalam proses perencanaan, produksi, dan diseminasi media juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ini.

F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Penyusunan dan diseminasi media penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk SDM penyuluh yang memiliki kompetensi teknis dan komunikasi. Penggunaan media digital juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran, karena memungkinkan jangkauan sasaran yang lebih luas tanpa memerlukan biaya produksi dan distribusi yang besar

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan penunjang pencapaian IKU ini meliputi identifikasi kebutuhan penyuluhan di lapangan, pengembangan materi penyuluhan yang kontekstual, pemanfaatan platform digital untuk penyebarluasan media, serta koordinasi internal antara penyuluh dan pengelola program. Kegiatan tersebut mendukung tersusunnya paket media penyuluhan yang relevan dan tepat sasaran

Indikator Kinerja Utama 18

Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi penyuluh perikanan. Penilaian kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyuluh perikanan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif dan berkelanjutan. Indikator ini baru mulai diterapkan pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia penyuluhan perikanan. Melalui indikator ini, BPPP Banyuwangi berkomitmen untuk

mendorong peningkatan mutu penyuluh perikanan melalui fasilitasi penilaian kompetensi secara terencana dan berkesinambungan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 43. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

<i>IKU 18. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)</i>								
Realisasi			2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	9	11	120	-	9	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus penilaian kompetensi di BPPP Banyuwangi tercatat sebanyak 11 orang dari target 9 orang. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 120%.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dibandingkan Tahun Sebelumnya

IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diimplementasikan pada Triwulan IV Tahun 2025 sehingga belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, persentase kenaikan capaian Tahun 2024–2025 tidak dapat dihitung.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan Renstra KKP 2025–2029, target jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus penilaian kompetensi pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 9 orang. Realisasi capaian sebesar 11 orang menunjukkan bahwa kinerja BPPP Banyuwangi telah melampaui target Renstra, dengan persentase capaian sebesar 120%.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai sehingga perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	9	11	120
2	BPPP Bitung	4	4	100,00

Perbandingan realisasi IKU 18 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi hanya dapat dilakukan terhadap UPT yang melaksanakan indikator ini. Pada Tahun 2025, IKU ini hanya diampu oleh dua UPT di lingkup BPPSDM KP, yaitu BPPP Banyuwangi dan BPPP Bitung. BPPP Banyuwangi menetapkan target sebanyak 9 orang dengan realisasi 11 orang, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Sementara itu, BPPP Bitung menetapkan target 4 orang dengan realisasi 4 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mendorong kelulusan penilaian kompetensi penyuluh perikanan, yang mencerminkan efektivitas pembinaan, kesiapan SDM, serta dukungan manajerial dalam pelaksanaan penilaian kompetensi penyuluh perikanan.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh peran aktif BPPP Banyuwangi sebagai penyusun dan pembuat media penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penyusunan media didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan di lapangan, sehingga materi yang disampaikan relevan dan aplikatif. Selain itu, dukungan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perikanan dan penyuluhan, ketersediaan sarana pendukung produksi media, serta pemanfaatan platform digital turut mempercepat proses penyusunan dan penyebarluasan media penyuluhan. Sinergi antar unit kerja dalam proses perencanaan, produksi, dan diseminasi media juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ini.

F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan penilaian kompetensi penyuluh perikanan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pemanfaatan SDM internal, koordinasi yang efektif dengan pihak penilai, serta

perencanaan kegiatan yang terarah memungkinkan pencapaian target tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penilaian kompetensi telah dilakukan secara efisien dan efektif.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan antara lain fasilitasi pendaftaran penilaian kompetensi bagi penyuluh perikanan, pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, serta koordinasi dengan UPT pelaksana penilaian kompetensi. Selain itu, dilakukan pembinaan dan motivasi kepada penyuluh perikanan agar siap mengikuti proses penilaian dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

Sasaran Program 4

Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Program ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyuluhan kelautan dan perikanan yang efektif, profesional, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluhan. Sasaran kegiatan ini diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (orang). Indikator tersebut mencerminkan upaya BPPP Banyuwangi dalam meningkatkan kompetensi teknis penyuluh kelautan dan perikanan agar mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara optimal, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja Utama 19

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang

berlaku. Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025. Pada triwulan ini tidak ada target capaian untuk IKU ini karena baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV tahun 2025. Metode perhitungan capaian IKU ini yaitu:

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$$

Tabel 45. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (Orang)

IKU 18. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (Orang)								
Realisasi			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	15	27	120	-	15	120

A. Capaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus pelatihan teknis di BPPP Banyuwangi tercatat sebanyak 27 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 15 orang. Dengan demikian, capaian kinerja IKU ini mencapai 120%, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan teknis telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang direncanakan.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dibandingkan Tahun Sebelumnya

IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada Tahun 2025, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Analisis capaian difokuskan pada ketercapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025–2029, target jumlah penyuluh perikanan yang lulus pelatihan teknis di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 15 orang. Realisasi capaian sebesar 27 orang menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil melampaui target Renstra,

dengan persentase capaian sebesar 120%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam peningkatan kapasitas SDM penyuluh perikanan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai sehingga perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	15	27	120
2	BPPP Bitung	8	10	120,00
3	BPPP Ambon	37	45	120,00
4	BPPP Medan	11	14	120,00

Berdasarkan data perbandingan dengan UPT lingkup BPPSDM KP, capaian BPPP Banyuwangi sebesar 120% sejalan dengan capaian beberapa UPT lainnya, seperti BPPP Bitung, BPPP Ambon, dan BPPP Medan yang juga mencapai 120%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan teknis bagi penyuluh perikanan telah menjadi prioritas bersama di lingkungan BPPSDM KP, dengan BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain tersedianya program pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan tugas penyuluh perikanan, komitmen manajemen dalam mendorong peningkatan kompetensi SDM, serta tingginya motivasi penyuluh perikanan untuk mengikuti dan menyelesaikan pelatihan. Selain itu, dukungan kebijakan dan perencanaan pelatihan yang terarah turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat kelulusan peserta pelatihan teknis.

F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan pelatihan teknis penyuluh perikanan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Penggunaan sarana dan prasarana pelatihan yang ada, serta pengelolaan anggaran yang efektif memungkinkan peningkatan jumlah peserta pelatihan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan program pelatihan teknis telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan meliputi perencanaan pelatihan teknis yang berbasis kebutuhan penyuluh perikanan, fasilitasi keikutsertaan penyuluh perikanan dalam pelatihan teknis. Selain itu, koordinasi yang baik dengan penyuluh peserta turut mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan teknis dan pencapaian target kinerja.

3.3 Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Indikator Kinerja yang dapat dibedakan menurut jenis kelamin, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Tabel di bawah ini menyajikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP Banyuwangi tahun 2025, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Analisis data ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi, keterlibatan, dan representasi perempuan dalam berbagai kegiatan pelatihan, pembentukan kelompok, dan kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menekankan pentingnya kesetaraan akses, kesempatan, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP Banyuwangi Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	IKU	Keterangan	L	P	Total
1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	Jenis Kelamin purnawidya yang terserap DUDIKA	946	525	1.471
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	Jenis kelamin peserta pelatihan	1023	747	1.770
3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	Jumlah pengurus dan anggota	61.325	13.373	74.611

	(kelompok)				
4	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	Jumlah pengurus dan anggota	9.021	2.731	11.752
5	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	Jenis Kelamin Ketua Gapokkan/ Koperasi/ Korporasi	3.418	1.126	4.544
6	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	Jumlah pengurus dan anggota	2.146	614	2.760

Sumber: data primer diolah (2025)

Berdasarkan data capaian IKU BPPP Banyuwangi, terlihat bahwa partisipasi laki-laki masih mendominasi hampir seluruh indikator, meskipun keterlibatan perempuan mulai menunjukkan kontribusi yang signifikan pada beberapa aspek.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Pada IKU lulusan pelatihan KP yang terserap di DUDIKA, dari total 1.471 purnawidya yang terserap, sebanyak 946 orang (64,3%) adalah laki-laki, sedangkan 525 orang (35,7%) adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja bagi lulusan perempuan sudah cukup terbuka, namun masih terdapat kesenjangan dibandingkan laki-laki.

2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)

Pada IKU masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih, komposisi peserta relatif lebih seimbang dibanding indikator lainnya. Dari total 1.770 peserta, 1.023 orang (57,8%) merupakan laki-laki dan 747 orang (42,2%) perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa akses perempuan terhadap pelatihan teknis mulai meningkat, terutama pada pelatihan pengolahan hasil perikanan,

kewirausahaan, dan kegiatan pendukung usaha perikanan.

3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

Pada indikator kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh, dari total 74.611 pengurus dan anggota, laki-laki mencapai 82,2%, sedangkan perempuan hanya 17,8%.

4. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

Pola serupa juga terlihat pada kelompok yang dibentuk, di mana perempuan hanya mencakup 23,2% dari total 11.752 pengurus dan anggota. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keanggotaan kelompok perikanan masih sangat maskulin, terutama pada subsektor perikanan tangkap dan usaha hulu.

5. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)

Pada IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit), komposisi jenis kelamin ketua masih didominasi laki-laki. Dari total 4.544 unit, 3.418 ketua (75,2%) adalah laki-laki, sementara 1.126 ketua (24,8%) perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan kelembagaan ekonomi perikanan, meskipun berperan aktif dalam kegiatan operasional dan usaha rumah tangga perikanan.

6. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

Pada indikator kelompok yang ditingkatkan kelasnya, komposisi pengurus dan anggota menunjukkan pola yang relatif konsisten, dengan laki-laki sebesar 77,8% dan perempuan 22,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses peningkatan kapasitas kelembagaan masih lebih banyak menjangkau kelompok dengan dominasi laki-laki.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi partisipasi dan kepemimpinan di hampir semua indikator IKU, meskipun partisipasi perempuan meningkat dalam pelatihan dan kelembagaan. Untuk memperkuat PUG, diperlukan langkah strategis berupa penyediaan pelatihan

yang ramah gender, dukungan fasilitator perempuan, dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam kelompok maupun koperasi, sehingga program BPPP Banyuwangi menjadi lebih inklusif dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat kelautan dan perikanan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan rekapitulasi SAKTI Tahun 2024 pada tanggal 31 Desember 2025, pagu anggaran BPPP Banyuwangi sebesar Rp. **103.593.474.000** dan realisasi sebesar Rp. **102.502.166.739,00** dengan persentase capaian 98,95%. Adapun realisasi per sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 48. Realisasi Anggaran per kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi
1	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	5.237.251.000	5.237.048.549
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi	98.356.223.000	98.302.424.451
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		103.593.474.000	102.502.166.739

Secara umum anggaran BPPP Banyuwangi dapat dimanfaatkan secara optimal dan kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan tercapai dengan baik.

3.5 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya

ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh

pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

BPPP Banyuwangi pada Triwulan IV Tahun 2025 memiliki tanggung jawab 6 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama, dengan 7 IK berstatus biru, dan 1 IK berstatus hijau.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*keyperformance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi di tingkat korporat Tahun 2024 **sebesar 117,20%**.

Tabel 49. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	75	75	83,16	110,88
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	1.030	1.030	1.770	120
3	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,32	0,32	0,40	120
4	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP	1	1	1	100
II. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
5	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	100	100	100
6	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	83	85,43	102,93

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
8	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	80	83,15	103,94
9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	92	99,69	108,36
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,50	71,50	100	120
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
13	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)	5.090	5.090	6.220	120
14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	216	216	260	120
15	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	772	772	950	120
16	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	44	55	120
17	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Banyuwangi (Paket)	1	1	2	120
18	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian	9	9	11	120

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kompetensi di BPPP Banyuwangi				
IV. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
19	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwang	15	15	27	120

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPP Banyuwangi sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian adalah masih adanya target pada PK sementara anggaran yang ada untuk kegiatan tersebut sudah diblokir ataupun dilakukan efisiensi anggaran. Hal ini menjadi ganjalan pada pencapaian target triwulan IV. Selain itu, dalam pengumpulan data dukung masih ada ditemukannya data yang duplikat dan data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka hal yang harus dilakukan yaitu melakukan verifikasi data secara teratur dan teliti sehingga capaian sesuai dengan data dukung yang ada.



**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI
2025**